

Persepsi Masyarakat Tentang Kiprah Kiai dalam Kancah Politik

*¹ Heri Fadli Wahyudi

¹ Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Madura, Indonesia

*fadliwahyudi37@gmail.com

Artikel History

Submit: 28 Agustus 2021

Review: 29 Agustus 2021

Revised: 21 Oktober 2021

Accepted: 30 Desember 2021

Abstract: The legitimacy authority of kiai's diversity it's nothing for the Indonesian muslim communities. even for some people, the figure of kiai gets the title as a holy person, wise along with other attributes that are embedded to the kiai. Whereas lately, the picture of politics continues to be torn apart and degenerates so that you are in an uncomfortable zone, that is a negative view of dirty world. So is there a synergistic meeting point between these two poles ? so that both of them can be in tune to become a single. This study aims to determine the publics of kiai, by using the type field qualitative reasearch when the reasearcher conducts reseacrh in the Somber Bentong hamlet, Karang Cempaka Village, Bluto District, Sumenep regency. to get understanding description, public percepstion and dakwah from political kiai. The techniques used in this research are observation, interview and documentation which are then analyzed by data reduction, data presentation and data verification. The conclusion of this study is that the term kiai undergoes a transformation of function that is only intended for a person with religious understanding who is considered capable. While public perception of kiai figures involved in politics practically does not result in a shift in community compliance. As well as the public's view of da'wah kiai politics remains in the optimistic space of healthy and clean politics.

Keywords: Perseption, Public, Kiai, Politics.

Pendahuluan

Kiai dalam tradisi Nusantara menjadi elemen sentral dalam dinamika kehidupan masyarakat (*society*), kondisi ini menjadi realitas sosial dan fakta sejarah yang tidak bisa diganggu gugat apalagi dibantahkan, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang notabena berpenduduk mayoritas Islam. Pengkultusan pada kiai didasari oleh beberapa faktor, diantaranya karena keyakinan penuh bahwa kiai adalah salah satu kunci menuju pemahaman ajaran islam. Pemahaman tentang islam tidaklah tunggal pada ranah aqidah semata, namun juga terintegrasi pada beberapa aspek kehidupan, termasuk pula dalam dunia politik itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekularisai antara islam dengan politik ataupun sebaliknya merupakan sebuah penyelewengan dari pemahaman ajaran islam itu sendiri (Mulkhan 2009, 232).

Contoh sederhana, dapat terlihat di hampir semua sektor kehidupan masyarakat muslim, bagaimana seorang kiai menjadi pembimbing (*guide*) terkait penyelesaian problematika hidup (*Problem Solving*) masyarakat muslim, seperti; permasalahan ekonomi, medis dan rumah tangga atau bahkan masalah politik. Keberadaan kiai di tengah komunitas masyarakat ini, tampil sebagai sosok dengan keistimewaan dan dianggap sebagai sumber keberkahan bagi masyarakat (Zamroni 2007, 274).

Berangkat dari eksistensi seorang kiai ditengah-tengah masyarakat, sosok kiai menyanggah dua fungsi utama, yakni sebagai agamawan sekaligus sebagai pelayan sosial. Sebagai agamawan sudah menjadi barang tentu jika seseorang menyanggah gelar tersebut memiliki tingkat pemahaman seputar keagamaan yang mumpuni, ini bisa terlihat dari bagaimana para kiai menjadi *leader* (pemimpin) dalam upacara keagamaan yang dilaksanakan bersama masyarakat. Sedangkan sebagai pelayan sosial, terlihat dalam peran kiai dalam upaya pemecahan persoalan masyarakat, seperti sebagai tempat untuk berkonsultasi maupun sebagai sosok yang dimintai petunjuk terkait masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, kiai mendapat kepercayaan dan perlakuan yang istimewa. Dalam sudut pandang sosiologi, kepercayaan serta kepatuhan terhadap sosok kiai (ulama), rupanya berada jauh di atas kepatuhan terhadap pejabat-pejabat formal (Kamilah and Oksiana Jatiningih 2017, 740). Maka dengan bermodalkan dua otoritas di atas, para Kiai memfungsikan dirinya sebagai sarana untuk mendakwahkan islam di tengah-tengah masyarakat, dan memimpin mereka ke arah yang tepat sesuai dengan garis-garis ketentuan ajaran syariat islam.

Posisi kiai sebagai teladan serta sebagai rujukan keagamaan bagi masyarakat dan juga santri-santrinya tentu menjadikan sosok kiai berada dalam zona yang strategis dan berperan besar bagi pengembangan masyarakat, karena tatanan sosial masyarakat yang terbentuk masih berpegang teguh pada nilai kepatuhan dan ketundukan pada kiai, sehingga perilaku yang ditunjukkan kiai senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat (*mauizah al hasanah*) (Azizzah 2003, 61).

Keterkaitan persoalan seputar agama dan politik, sudah sangat lama terjadi dan tercatat dalam sejarah islam, mengingat bahwa segala aspek yang ada, baik dari aspek kehidupan di dunia ataupun aspek kehidupan akhirat telah diatur oleh islam, sehingga dapat diyakini kebenarannya bahwa islam sebagai ideologi suatu Negara, walaupun konsep Negara islam itu sendiri tidak ada bentuk pastinya (Suhelmi 2002, 112). Maka

keterlibatan seorang kiai dalam pemerintahan diyakini sebagai bagian dari bentuk dakwah islamiyah.

Dalam persoalan politik, karisma kiai merupakan suatu yang menggoda bagi siapapun yang hendak berkuasa, akibatnya sering kali kiai didekati oleh para pejabat untuk meraih simpati masyarakat. Untuk terus menerus menyambung keharmonisan kiai dan pejabat itu, para kiai sering menjadi mediator pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pemerintah (Haedari 2006, 22). Namun dewasa ini, pandangan yang berkembang di tengah masyarakat politik diidentikkan dengan dunia kotor, sebagaimana yang selalu disosialisasikan secara massif oleh dunia massa, anggapan tersebut kini sudah menjadi persepsi umum yang hampir diimani & dikonfirmasi oleh semua lapisan masyarakat. Hal itu terjadi akibat perilaku oknum politik yang melakukan hal-hal yang bukan untuk kepentingan rakyat (bersama), melainkan lebih mementingkan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan pribadi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, pada akhirnya membuat banyak orang bersikap antipati terhadap politik dan beranggapan seolah-olah semua orang yang aktif dalam politik itu kotor (Dhakiri 2013, 2).

Melihat pandangan masyarakat tentang politik di atas, tampak bagaimana antara Kiai dan politik mengalami sebuah “*crash* (benturan)”. Kiai dengan identitas kesakralannya yang penuh akan dimensi moral serta nilai keikhlasan, tanpa tendensi maupun ambisi. Sedangkan politik menjadi identik dengan hal yang profan, adanya kepamrihan, siasat hitam serta bermuatan politis dan tendensius. Sehingga terjadi sebuah kekhawatiran tersendiri akan sosok kiai menjadi alat politik, pemanis kelompok-kelompok tertentu akan berakibat pada dekadensi keistimewaan kiai seperti moralitas, ketulusan dan pengabdian pada masyarakat menjadi tereduksi atau bahkan hilang karena terkalahkan oleh kekuasaan (Ja’far 2009, 30).

Lantas bagaimana dengan kiai yang dianggap sebagai manusia suci jika terlibat dalam kancah perpolitikan yang belakangan dianggap kotor. Hal inilah yang kemudian menarik peneliti untuk mengetahui tentang bagaimana persepsi masyarakat akan fenomena keterlibatan kiai dalam kancah berpolitikan, di mana kiai sering kali tampil & terlibat dalam kontestasi pemilihan umum, baik secara independen maupun diusung oleh kelompok tertentu, dalam hal ini khususnya persepsi masyarakat Dusun Karang Bentong, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, karena masyarakat di desa ini merupakan masyarakat yang masih berpegang pada nilai-nilai

religius serta agamis, namun demikian juga dibarengi dengan munculnya kiai-kiai dari kampung tersebut yang terlibat dalam kancah perpolitikan praktis.

Penelitian lain seputar tentang Kiai dan Politik juga pernah dilakukan oleh Imam Suprayogo dengan judul *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, penelitian ini memfokuskan diri pada sosok Kiai dalam mengemban peran-peran sosialnya, serta menelusuri jejak-jejak keterlibatan Kiai dalam politik. Penelitian lain yang serupa dengan pembahasan kiai politik juga dilakukan oleh Abdurrahman Jo, pada tahun 2010 yang dilakukan di Al-amien Prenduan, yang berjudul *Sikap dan Pandangan Para Kiai Al-amien Tentang Politik Praktis (studi fenomenologi tentang makna)*, yang menekankan pada pandangan para kiai al-amein tentang politik praktis (Jo 2008).

Perosalan kiai politik juga pernah dibahas oleh Zainuddin Syarif dalam penelitian yang berjudul *Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura*, dengan hasil penelitiannya yang berupa; pertama, Formula politik seorang kiai digunakan dalam upaya mempertahankan otoritas kepemimpinannya berdasarkan karakteristik tradisional serta karakteristik karismatik religius (Syarif 2016, 294). Dalam penelitian lain yang berjudul *Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam: Membaca Aktivitas Dakwah Dan Politik Kiai Pada Momentum Pemilu*, yang ditulis oleh Fathor Rosi, dimana dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa antara dakwah seorang kiai dan politik dapat dijadikan sebagai satu kesatuan, dan sebagai wasilah dalam penyampaian ajaran islam, karena otoritas politik dapat mempengaruhi ruang gerak dakwah islamiyah (Rosi 2020, 233).

Orisinilitas dalam penelitian ini terletak pada masalah pemusatan persepsi atau anggapan masyarakat Dusun Somber Bentong, Desa Karang Cempaka, tentang kiai politik yang berhubungan dengan peran dan dakwah kiai politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang tercermin dalam ungkapan madura; *Bhappa' Bhappu', Ghuru, Rato* yang berarti Ibu, Ayah, Guru, & Penguasa. maka dari adagium tersebut tampak jelas terlihat bagaimana kepercayaan dan ketaatan masyarakat pada pemuka agama (kiai) menjadi poros yang tetap dijunjung tinggi.

Metodologi

Dari judul dan permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yakni dengan prosedur penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memperjelas kesesuaian terkait teori-teori yang digunakan dengan praktek maupun perilaku yang ada di lapangan (Suginono

2008, 3). Subjek penelitian dalam penelitian ini beberapa penduduk Dusun Sumber Bentong Karang Cempaka Kec. Bluto yang terdiri beberapa tokoh dan masyarakat setempat di Dusun Sumber Bentong ini. Prosedur pengumpulan data lapangan yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, seperti observasi lapangan, wawancara (interview), serta Dokumentasi. Setelah proses pengumpulan data dilakukan dan data terkumpul, dalam proses berikutnya peneliti melakukan Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dan sebagai langkah langkah penunjang dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan uji keabsahan data dengan cara penggunaan triangulasi, baik berupa triangulasi sumber, maupun triangulasi teknik.

Hasil Penelitian

A. Pengertian kiai politik dalam masyarakat Dusun Sumber Bentong

Istilah kiai ataupun ulama merupakan pewaris para nabi serta mereka memiliki fungsi sebagai pemimpin, selain itu keberadaan kiai di tengah-tengah masyarakat pada umumnya kiai memiliki banyak peran, yaitu sebagai pemuka agama, dan pelayan sosial. Sementara itu politik sendiri memiliki arti interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam wilayah tertentu (Dhakiri 2013, 33). Artinya politik adalah dimensi kekuasaan yang mendapat legalitas publik, yang dalam hal ini berhubungan dengan pemerintahan, bagaimana sebuah pemerintahan itu berjalan dengan baik sesuai dengan koridor-koridor yang disepakati bersama. "Kiai politik sebagai kiai yang terjun dalam kancah politik praktis; artinya ada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan predikat kiai politik jika terlibat secara praktis pada salah satu level tersebut" (Fikri 2019)

Sedangkan sosok ataupun figur seorang kiai dalam politik mereka menjalankan perannya yang terkait dengan kepentingan umum melalui dunia politik secara langsung. Yang mana politik dijadikan sebagai salah satu wadah atau sarana dalam pengembangan dan penyebaran dakwah islam. Pemahaman masyarakat Dusun Sumber Bentong tentang kiai politik adalah sebagai seorang tokoh agama, atau pemuka agama yang dianggap alim serta menjadi panutan bagi segenap masyarakat dalam praktek-praktek keagamaan, yang kemudian meneruskan kancah dakwahnya dengan melalui cara masuk dalam dunia pemerintahan (kekuasaan) melalui politik itu sendiri, mereka dianggap

kapabel dan mampu untuk memimpin dan mengurus subuah kekuasaan, dengan tujuan politik sebagai sarana jembatan dalam dakwah islamiyah yang diembannya.

B. Persepsi atau pandangan masyarakat terhadap kiai yang terjun dalam politik

Perkembangan arus peran politik dalam dunia masyarakat paling tidak berhasil memunculkan dua pandangan sikap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. *Pertama*, pandangan bahwa kiai tidak perlu terlibat dalam masalah politik, kiai adalah seorang penjaga rohani umat, karena itu seharusnya tidak memihak terhadap partai tertentu. Pandangan ini didasari pemikiran bahwasanya pondok pesantren adalah tempat mengaji ilmu agama dan sebagai sosialisasi dan pengejawantahan ajaran islam. pandangan *Kedua*, kiai sah dan boleh perpolitik, pandangan semacam ini berkeyakinan bahwa berpolitik tidak harus dihindari, sebab politik merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan itu sendiri dan ajaran islam memiliki kandungan menyeluruh dalam kehidupan, karenanya partisipasi kiai dalam politik selalu menjadi relevan (Suprayogo 2009, 43). Dan dianggap sebagai salah satu bentuk dakwah islamiyah, karena dakwah tidak selamanya harus di pondok pesantren dan dalam bentuk pengajian saja.

Ketika orang menyebut istilah politik, maka pengertiannya sering dikaitkan dengan masalah pemerintahan, kekuasaan, partai politik atau upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara. Istilah politik sebenarnya memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dan sebagai kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kiai sebagai elit agama selalu terlibat dalam kegiatan politik sebab kiai sebagai pemimpin masyarakat memerlukan otoritas, dan terlibat dalam peran sosial untuk kepentingan masyarakat. “Sangat setuju, asalkan kiai yang berpolitik itu jangan menghilangkan tugas pokoknya yaitu dakwah, politik hanyalah sarana dan jembatan untuk berdakwah, dan itu bagus” (Muzayyidi 2019).

Begitupun dengan pandangan dari beberapa informan lainnya, yang secara umum persepsi masyarakat Dusun Sumber Bentong terhadap kiai yang terjun dalam politik sangat baik dan mereka menganggap kiai itu sangat diperlukan kehadirannya dalam dunia politik, agar mampu menghilangkan stigma politik kotor, serta mampu mewarnai dunia perpolitikan menjadi politik yang bersih, kehadiran kiai diharapkan memberikan angin segar dan warna dengan kekuatan mental untuk menjaga integritasnya, tanpa harus

menghilangkan tugas pokok utamanya yaitu dakwah, antinya kiai menjadikan politik sebagai jembatan untuk dakwah islam.

Sedangkan bentuk keterlibatan kiai dalam politik bisa bersifat ekspresif atau instrumental, ekspresif artinya apabila aktivitas yang di ambil oleh kiai cenderung mengeksploitasi dan memanipulasi simbol-simbol keagamaan maupun penggalangan massa. Sedangkan politik instrumental adalah politik yang menekankan efektivitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara langsung (Suprayogo 2009, 47). Disamping sosok kiai yang terjun ke dalam politik, diharapkan mampu menjadi pencerah bagi masyarakat dalam menentukan sikap dan pandangan masyarakat dalam hal berpolitik. Sehingga menjadi cerminan dan contoh bagi elit-elit politisi lainnya, sehingga dunia perpolitikan kembali kepada jalurnya. Sebagaimana dicontohkan dalam kisah nabi Muhammad dimana dukungan politik yang beliau peroleh dari segenap masyarakat Madinah yang dicontohkan oleh nabi dengan nabi berusaha untuk berdiri dan tampil di tengah-tengah masyarakat dengan peran mempersatukan mereka yang terlibat dalam konflik pada masa itu. Nabi Muhammad SAW mampu membuktikan dengan menyelesaikan segala konflik yang itu secara arif dan bijaksana sehingga semua pihak mendapat kepuasan (Amin 2015, 4).

Namun demikian, keterlibatan para kiai dalam politik praktik tentu akan melahirkan konsekuensi baru bagi masyarakat khususnya ummat islam, hal tersebut dapat terlihat dari banyak dan bermunculannya partai, ormas dan kelompok berbasis islam dengan keterlibatan serta peran aktif kiai di dalamnya hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan baru yaitu tereduksi dan terpecah-pecahnya suara masyarakat muslim yang berakibat pada kegagalan kiai dalam proses dakwah dalam pemerintahan (Qadir 2012, 288).

C. Pandangan masyarakat terhadap dakwah kiai politik di tengah-tengah masyarakat

Secara etimologis dakwah berasal dari bahasa arab yang berarti panggilan, ajakan, seruan, atau ajakan, secara terminologis dakwah merupakan kegiatan menyeru maupun mengajak sesama umat islam, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam rangka mentaati dan mengikuti perintah Allah SWT serta meningkatkan keimanan setiap individu agar mendapatkan ridha Allah SWT (Moedjiono 2007, 6). "Bagi saya positif saja, jika hal itu menganjurkan pada kebaikan, dan selama

tidak mencampur adukkan anatar jabatan politis yang dipegangnya dengan masalah keagamaan”(Subaidi 2019).

Penyampaian dakwah dapat menggunakan beberapa di tengah-tengah masyarakat. Pertama, menggunakan metode *bil-kehitobab* yakni proses dakwah yang menggunakan *al-ittisholatul lisaniyah* dan *al-ittisholatul isyariayah* (komunikasi verbal dan non verbal). Kedua menggunakan metode *bil-kitabab* atau proses dakwah yang menggunakan sarana tulisan. Sedangkan yang ketiga menggunakan metode *bil-hal* atau proses dakwah melalui tindakan langsung sesuai kapasitas, dan kemampuan masing-masing.

Posisi kiai sebagai elit agama yang berpengaruh, menjadikan mereka terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, dan pengembangan masyarakat (Suprayogo 2009, 4), lebih jauh dari itu kiai yang terjun pada dunia politik dalam pandangan masyarakat Dusun Sumber Bentong Desa Karang Cempaka, beranggapan bahwa pengembangan dakwah bisa dilakukan dalam kekuasaan pemerintahan, karena dakwah akan lebih mudah dan berhasil jika didukung dengan kekuasaan dan politik menjadi jembatan dakwah kiai artinya keterlibatan kiai dalam politik merupakan dalam rangka kegiatan dakwah islamiyah.

Tiga metode dakwah yang dapat digunakan ditengah-tengah masyarakat. Pertama, menggunakan metode *bil-kehitobab* yakni proses dakwah yang menggunakan *al-ittisholatul lisaniyah* dan *al-ittisholatul isyariayah*. Kedua menggunakan metode *bil-kitabab* atau proses dakwah yang menggunakan sarana tulisan. Sedangkan yang ketiga menggunakan metode *bil-hal* atau proses dakwah melalui tindakan langsung sesuai kapasitas, dan kemampuan masing-masing.

Dusun Sumber Bentong Desa Karang Cempaka masih termasuk dari masyarakat pedesaan, dan dalam masyarakat pedesaan dakwah yang paling efektif untuk dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan metode *bil-lisban* serta *bil-hal*, dalam prakteknya kiai politik tetap menggunakan metode dakwah tersebut ditengah masyarakat karena konsep “*samikna wa atoknah*” masih melekat pada masyarakat Dusun Sumber Bentong, sehingga masyarakat dapat menerima dakwah yang disampaikan oleh kiai politik selama kontennya tentang agama dan tidak melanggar norma agama dan Negara.

Sebagai salah satu contoh dari dakwah sorang Kiai politik, sebagai orang yang menjadi panutan masyarakat dengan menjalankan fungsi ganda, yaitu fungsi agamawan *ulama'* dan fungsi pemimpin *umara'*, mestinya menjadi pengawal melanjutkan pemberantasan “*money politics*”, bukan malah melegalkan “*money politics*” tersebut,

mengingat salah satu kewajiban dari seorang kiai ialah penegakan “*amar ma'ruf nahi mungkar*” (Suharto 2011, 95). Maka dengan demikian tindakan dari seorang kiai tersebut dalam dunia politik merupakan salah satu bentuk dakwal, berupa pengajaran dan wujud aplikatif dari kampanye penegakan politik moral.

Kesimpulan

Pemaknaan istilah kiai yang menjadi tanda dan tersemat pada sosok tertentu mengalami sirkulasi penyempitan sehingga dalam kondisi sekarang sebutan atau istilah kiai hanya menjadi gelar tunggal bagi sosok yang agamawan muslin saja dengan segala keistimewannya. Begitu pula dengan pemaknaan istilah tersebut di tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Dusun Sumber Bentong, Desa Karangcempaka Sumenep, tetap dan selalu menduduki singgasana keistimewaan bagi segenap penduduk di sana, yakni seorang tokoh agama yang mumpuni keilmuannya dan menjadi pemimpin dalam upacara-upacara keagamaan yang berlangsung

Kehadiran sosok kiai dalam kancah perpolitikan disambut positif dengan keantusiasan masyarakat Dusun Sumber Bentong terhadap kiai yang terjun dalam politik serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka dengan harapan keberadaan kiai itu sangat diperlukan kehadirannya dalam dunia politik, agar mampu menghilangkan segala persepsi ataupun stigma negative yang melekat, dan menjadikan warna dunia perpolitikan menjadi politik yang ideal.

Keterlibatan kiai dalam dunia politik bukanlah sebuah fenomena baru, sebab dalam ajaran dan sejarah keislaman itu pembahsan seputar perpolitikan itu sendiri memang dibahas baik secara implisif ataupun eksplisit, karena memang dengan jalan itulah penyebaran dakwah islamiyah tetap dapat terjaga keberlangsungannya dan memperoleh kemudahan dalam implementasi dakwah islamiyah. Maka walaupun dalam keabu-abuan, dunia politik tetaplah harus menjadi jalan dan lahan yang diperjuangkan oleh para kiai sebagai sosok yang mendapat legitimasi otoritas keagamaan dari masyarakat dalam pengembangan sayap dakwah islamiyah

Daftar Pustaka

- Amin, Nasihun. 2015. *Paradigma Teologi Politik Sunni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizzah, Nurul. 2003. *Artikulasi Politik Santri Dari Kyai Menjadi Bupati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dhakiri, Moh. Hanif. 2013. *Pedoman Berpolitik Warga NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fikri, Ali. 2019. *Dalam Wawancara Dengan Peneliti*. Dusun Sumber Bentong.
- Haedari, Amien. 2006. *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Ja'far, Suhermanto. 2009. *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jo, Abdurrahman. 2008. "Sikap Dan Pandangan Para Kiai Al-Amien Tentang Politik Praktis (Studi Fenomenologi Tentang Makna)." Preduan: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan.
- Kamilah, and Oksiana Jatiningsih. 2017. "Sosok Kiai Dalam Konstruksi Intelektual Muda Bangkalan." *Kajian Moral & Kewarganegaraan* 5 No. 3 Jilid 1.
- Moedjiono, Imam. 2007. *Metode Dakwah Praktis*. Yogyakarta: As-Salam Press.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2009. *Politik Santri, Cara Menang Merebut Hati Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Muzayyadi. 2019. *Dalam Wawancara Dengan Peneliti*. Dusun Sumber Bentong.
- Qadir, Zuly. 2012. *Sosiologi Politik Isla, Konsetstasi Islam Politik & Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosi, Fathor. 2020. "Gerakan Politik Kiai Dan Dakwah Islam: Membaca Aktivitas Dakwah Dan Politik Pada Momentum Pemilu." *At-Thurost: Journal of Islamic Studies* 07 & No. 02.
- Subaidi, Ahmad. 2019. *Dalam Wawancara Dengan Peneliti*. Dusun Sumber Bentong.
- Suginono. 2008. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun. 2011. *Dari Pesantren Untuk Ummat, Eksistensi Pesantren Di Era Globalisasi*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Suhelmi, Ahmad. 2002. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Nasir*. Jakarta Selatan: Penerbit Teraju.
- Suprayogo, Imam. 2009. *Kiai & Politik, Membaca Citra Politik Kiai*. Malang: UIN-Malang Press.
- Syarif, Zainuddin. 2016. "Pergeseran Perilaku Politik Kiai Dan Santri Di Pamekasan Madura." *At-Thahrir* 16 No. 2 (November): 294–312.

Zamroni, Imam. 2007. "Juraga, Kiai Dan Politik Di Madura." *UNISIA* 30 No. 65
(September)



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).